

## **DI BALIK POLITIK PENCITRAAN**

**Oleh**

**Yoseph Andreas Gual**

Salah satu strategi yang dipakai para politisi untuk memenangkan pemilu yakni dengan politik pencitraan. Politik pencitraan itu sendiri merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam menggambarkan seseorang, sekelompok orang atau kondisi tertentu dengan menggunakan permainan kata – kata politis.

Menurut Kosslyn (Kuper&Kuper: 2000), pencitraan digunakan untuk membantu seseorang dalam mengingat, menghafal dan memperdalam gambaran verbal mengenai subjek atau situasi tertentu dan pada akhirnya mengarahkan orang itu untuk bertindak. Dan menurut Nimmo (2000), sebageian di antara gambaran subjektif itu akurat dan gamblang. Gambaran itu membantu orang untuk menyesuaikan diri dengan realitas di luar dirinya. Sementara sebagian dari gambaran itu menyesatkan, ambigu, kabur, ilusif dalam menggambarkan realitas. Walaupun demikian, Nimmo menandakan bahwa gambaran itu diperlukan dan memiliki makna tertentu bagi manusia.

Dari pendapat Kosslyn dan Nimmo ini, dapat diambil kesimpulan bahwa politik pencitraan akan selalu ada dan perlu dalam percaturan politik. Masyarakat membutuhkan gambaran politik tentang seseorang atau realitas politik tertentu untuk bertindak dalam hal ini menentukan pilihannya ketika pemilu.

Dalam kancah perpolitikan nasional, politik pencitraan pernah digunakan oleh Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY). SBY dicitrakan sebagai seorang pembantu yang “berkianat” kepada tuannya (Megawati) namun memiliki kecerdasan, kewibawaan, integritas dan dekat dengan masyarakat. Ia juga dicitrakan sebagai tokoh pembawa perubahan. Pencitraan ini berhasil mengambil

simpati rakyat yang pada akhirnya mendorong rakyat memilihnya menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Dari contoh (dan masih banyak contoh yang lain di negara ini) penerapan politik pencitraan di atas terlihat jelas bahwa politik pencitraan yang berkembang di Indonesia adalah pola pencitraan figur. Hal ini, berbanding terbalik dengan pola politik pencitraan di negara – negara barat. Misalnya, di Amerika Serikat.

Menjelang pemilihan presiden di AS, Partai Republik maupun Partai Demokrat menggunakan politik pencitraan pula. Namun polanya berbeda dengan yang sering dipakai di Indonesia. Selain pola pencitraan figur, pola pencitraan yang diutamakan adalah pola pencitraan yang menekankan pada visi dan misi para calon.

Terlepas dari persaingan antara Barrack Obama dan Hillary Clinton untuk menjadi calon presiden mewakili Partai Demokrat, kedua calon ini memiliki visi misi yang jelas tentang AS ketika mereka memimpin. Misalnya, isu politik luar negeri AS di Timur Tengah terutama di Irak. Baik Obama maupun Clinton dengan cara yang berbeda berjanji akan segera mengeluarkan pasukan AS dari Irak ketika mereka terpilih. Hal ini, berbanding terbalik dengan seteru mereka dari Partai Republik, Jhon McCain yang berjanji akan tetap mempertahankan pasukan AS di Irak.

Dari perbandingan di atas sebenarnya kita tidak bisa melelepisahkan secara tegas pola politik pencitraan dalam kategori – kategori. Sebab dalam kaneah perpolitikan kedua pola ini dipakai. Namun demikian, kita dapat melihat fokus penekanan pemakaian dalam percaturan politik (pemilu).

Dari kesadaran akan kenyataan di atas, kita dapat melihat lebih jauh apa implikasi penerapan dari kedua pola tersebut. *Pertama*, pola pencitraan politik yang lebih menekankan aspek figur akan melihat calon sebagai orang sempurna. Kesempurnaan itu bukan didorong atas apa yang dapat dilakukan tetapi karena sentimen SARA dan kepentingan lain. Mereka akan melihat visi dan misi hanyalah formalitas yang dipakai untuk melengkapi tuntutan hukum. Karena itu, visi dan

misi disusun tidak dengan pertimbangan – pertimbangan kritis rasional untuk diimplemetasikan melainkan sekedar janji – janji manis yang setelah berkuasa mudah ditinggalkan. Visi dan misi itu bukan merupakan sebuah komitmen kuat antara pemimpin dengan masyarakat namun sekedar sebagai bahan kampanye yang tidak terikat untuk dilaksanakan nantinya.

Berbeda dengan pola politik pencitraan yang lebih menekankan visi dan misi calon. Pola ini melihat pemimpin penting tetapi yang lebih penting adalah apa yang akan dibuat oleh seorang pemimpin ketika ia memimpin. Karena itu, visi dan misi harus disusun secara teliti, terencana, tepat, kritis dan rasional agar dapat dijalankan. Sebab apapun yang akan terjadi calon pemimpin itu akan menjalankan visi dan misinya. Visi dan misi merupakan ikatan antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dan berkomitmen untuk mewujudkannya.

*Kedua*, sebenarnya dari kedua pola ini juga kita dapat siapa sebenarnya masyarakat pemilih. Pola yang terfokus pada figur menunjukkan masyarakat pemilih adalah orang – orang tidak kritis dan cerdas dalam memilih. Mereka hanya didorong oleh luapan emosi sesaat akan latar belakang dan kepribadian sang figur. Sedangkan pola yang lebih memfokuskan diri pada visi dan misi menunjukkan bahwa masyarakat pemilih adalah orang – orang cerdas, kritis dan sadar akan tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya.

*Ketiga*, tanggung jawab atau komitmen pemimpin. Pola figur, karena visi dan misi bukan merupakan sebuah ikatan karena itu, seorang pemimpin tidak akan merasa bersalah bila tidak melaksanakannya. Hal ini berbeda dengan pola visi dan misi. Karena melihat visi dan misi sebagai sebuah ikatan maka seorang pemimpin akan sangat malu dan merasa bersalah bila tidak dapat mewujudkan visi dan misinya. Untuk menebus “kesalahan”nya biasanya seorang pemimpin rela mengundurkan diri dari jabatannya.

*Keempat*, kontrol pemerintahan. Dengan politik pencitraan figur, akan sulit dipredikasikan ke arah mana pemerintahan itu akan dijalankan. Walaupun ada visi

dan misi namun visi dan misi itu bukan merupakan harga mati yang harus dilakukan. Hal ini menyulitkan pemimpin dalam memimpin pembangunan dan juga dalam mengontrol sang pemimpin. Sebaliknya, dengan pola pencitraan visi dan misi maka semua komponen tahu ke arah pemimpin itu akan berlandaskan dan masyarakat semua komponen dapat menuntut dan mengontrolnya secara ketat.

*Kelima*, konflik. Sadar atau tidak sadar pola politik pencitraan yang lebih menekankan pada figur berpotensi melahirkan konflik horisontal dalam masyarakat. Masyarakat akan terkotak – kotak karena mendewakan figur (karena sentimen SARA dan Kepentingan) yang didukungnya dan menyepelekan figur lain. Masyarakat tidak berkonflik karena visi dan misi pemimpinnya tetapi karena figur yang didukungnya kalah.

### **Relevansinya untuk NTT**

Pertanyaannya adalah apa relevansi hal di atas dengan situasi politik NTT sekarang ini? Saya berpendapat situasi politik di NTT menjelang berbagai suksesi bupati dan terutama gubernur dapat dijelaskan dalam kerangka ini

Sadar atau tidak sadar pola politik pencitraan yang berkembang di NTT (khususnya pilkada gubernur) adalah pola politik pencitraan figur dan bukan pada apa yang akan dibuat oleh para figur nantinya.

Politisi di NTT (dan menjangkit pada masyarakat) masih lebih suka dan betah bermain dalam isu SARA untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pencitraan yang dibuat masih kental dengan isu primordial ini untuk memenangkan pilkada. Sementara hal yang paling substansial dari sebuah pilkada yakni memilih pemimpin yang akan melakukan apa yang dibutuhkan dan diharapkan rakyat kurang diperhitungkan.

Hal ini sudah terlihat jelas dalam masyarakat. Ungkapan “Asal bukan dia atau Asal jangan mereka atau Asal jangan dari golongan itu” sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya yang dipentingkan adalah figur politik dan bukan apa yang akan dibuat oleh mereka. Ini juga menggambarkan kepada kita, bahwa

sebenarnya masyarakat kita belum rasional, kritis dan cerdas dalam memilih pemimpinnya. Masyarakat kita adalah para pemilih emosional yang masih terjebak dengan mitos pemimpin.

Pada saat yang sama juga, sebenarnya masyarakat kita belum sadar sepenuhnya mengapa kita memilih pemimpin. Memilih pemimpin bukan untuk menjadikannya sebagai penguasa tetapi pelayan yang melayani masyarakat. Ini berarti kita tidak hanya melihat siapa dia tetapi lebih jauh adalah apa yang akan dia buat. Dan benar – benar ia mempunyai keinginan untuk melakukannya. Bukan sekedar janji.

Efek lanjut dari penekanan pada pola politik pencitraan yang lebih menekankan aspek figur adalah akan terjadi pengkotakan dan perpecahan dalam masyarakat. Saya selalu yakin bahwa perpecahan dalam masyarakat akibat suksesi salah satu diakibatkan oleh pola pencitraan politik yang menekankan pada isu SARA bukan pada aspek visi dan misi. Masyarakat akan memberontak bila figurnya kalah. Namun bila aspek visi dan misi yang ditekankan gejolak dalam masyarakat sulit terjadi karena siapapun yang akan memimpin, tujuan kepemimpinannya adalah melayani masyarakat walau berbeda titik penekanan dan cara.

### **Kontrak Politik**

Melihat realitas ini, sudah sewajarnya masyarakat sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat sudah harus keluar dari jebakan politik pencitraan yang menekankan pada figur. Ke depan kita tidak sekedar membutuhkan seorang pemimpin memiliki citra yang baik dan pandai mengobral janji – janji namun tidak melihat janjinya sebagai sebuah utang yang harus dibayar kepada masyarakat. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki orientasi kepemimpinan yang jelas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat.

Karena itu, menjelang pilkada ini sebenarnya masyarakat harus bersuara. Sebab bukan perbedaan (SARA) di dalam masyarakat (yang digunakan calon –

calon untuk “menjual diri”) yang membuat masyarakat lemah (mendapatkan pemimpin yang berkualitas) melainkan kebungkaman masyarakat terhadap apa yang masyarakat mau dari seorang pemimpin. Karena itu, kebungkaman harus dipecahkan dengan menuntut para calon pemimpin mengikuti keinginan masyarakat.

Cara terbaik saat ini adalah dengan kontrak politik. Masyarakat mengajukan program – program yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang terpilih selain visi dan misi mereka. Bila pemimpin tidak mampu melaksanakannya, dengan suka rela ia mengundurkan diri dari jabatan pemimpin. Program – program itu diberikan kepada semua calon yang ingin memimpin daerah ini untuk menandatangani sebagai kontrak antara masyarakat dan para calon. Dari sini, masyarakat akan mengetahui siapa calon pemimpin yang mengutamakan masyarakat sebagai subjek pelayanan kepemimpinannya. Mereka yang mau menandatangani yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk dipilih.

Saya berpikir kontrak politik dengan konsekwensi seperti itu mungkin sekarang ini, di daerah ini terasa utopis. Namun ini juga sebentar tantangan bagi para calon pemimpin untuk menguji motivasi mereka dalam memimpin daerah ini. Apakah benar keinginan untuk menjadi pemimpin dimotivisir oleh kehendak melayani masyarakat atau sekedar topeng untuk kepentingannya sendiri. Ini juga, merupakan satu cara bentuk nyata tanggung jawab para politisi dalam mendidik masyarakatnya, bagaimana berpolitik secara cerdas, kritis dan rasional.